

Membangun Fundamental Ekonomi dalam Menghadapi Tantangan Hegemoni Perekonomian Global

(Tinjauan Perspektif Perekonomian Syari'ah)



Oleh: M. Faisal Abdullah

Walaupun tema perekonomian global telah menjadi sasaran bahasan dalam dasawarsa terakhir, namun diskursus yang berkembang belum menyentuh aspek substansial khususnya implikasi yang ditimbulkan. Sementara paradigma yang berkembang dalam mengkritisi perekonomian global antara lain ditandai dengan peralihan model perekonomian dari *industrial economy* menuju *information economy*. Apabila dalam *industrial economy* terjadi kontradiksi antara faktor modal dengan pekerja, maka dalam *information economy* kontradiksi akan terjadi antara local dengan cosmopolitans. Fenomena lain dalam menghadapi perekonomian global berdasarkan tinjauan ekonomi kawasan, bahwasannya telah terjadi perubahan peta kawasan yang mencerminkan kekuatan perekonomian global. Kawasan Tripolar (AS, Jepang dan Eropa Barat) menjadi multipolar dalam wujud blok-blok perdagangan berdasarkan kawasan perdagangan. Menghadapi kondisi ini tawaran konsep perekonomian berbasis syari'ah bukan lagi sebuah alternatif melainkan suatu kebutuhan. Keunggulan konsep inovatif yang berbasis pada 2 (dua) kriteria: kualifikasi produk dan membangun koneksitas melalui relasional yang konstruktif merupakan konsep strategis dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Keunggulan strategis berdasarkan perekonomian syari'ah ini telah terbukti dalam percaturan ekonomi masa Rasulullah dan Khulafa'u Rasyidin.

Iftitah

Tatanan kehidupan umat Islam dalam memasuki abad ke-21 dihadapkan dengan berbagai harapan historis dan tantangan sehubungan dengan terjadinya perubahan yang mempengaruhi kebijakan suatu negara. Sulitnya menghindari sistem perekonomian global karena percaturan pasar bebas disertai kebijakan yang cenderung protektif semakin memperkokoh hegemoni kapitalis. Runtuhnya komunisme Eropa Timur dan Uni Soviet menjadi sebab perubahan kekuatan yang mendominasi keputusan politik, militer maupun perekonomian.

Perubahan peta kekuatan tersebut menempatkan umat Islam pada situasi dan posisi yang sangat menentukan. Hal ini bukan saja disebabkan kondisi politik dan ekonomi umat yang masih ditentukan oleh negara industri maju, melainkan suatu pilihan apakah umat Islam memiliki suatu kekuatan baru yang menentukan sistem perekonomian dunia. Ataupun sebaliknya umat Islam yang selama ini sebagian berada di bawah garis kemiskinan semakin terpuruk sebagai konsumen produk negara maju dengan berbagai dampak kultural, ideologis dan politik. Maka era kebangkitan Islam sebagaimana pernah dicanangkan pada awal memasuki abad ke-15 H perlu pembuktian dalam tantangan percaturan dewasa ini. Kurun waktu 23 tahun yang sama lamanya dengan waktu/lamanya misi kerasulan Muhammad SAW merupakan momentum untuk bermuhasabah akan peran umat Islam terutama dalam sistem perekonomian. Umat Islam seharusnya mampu menjawab pertanyaan sejarah masa depan seiring dengan akan berakhirnya kejayaan kapitalis-sosialis. "Apakah konsepsi sistem perekonomian Islam kelak menjadi alternatif bagi postmodernisme ideologis dalam bidang ekonomi sangat bergantung pada nurani tokoh Islam yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan ikhtiar konkrit setiap umat Islam.

Inferioritas dalam Percaturan Global

Kekayaan terbesar umat manusia dewasa ini adalah identitas diri dalam wujud pemikiran yang inovatif. Sedangkan kekayaan yang bersifat materi,

penemuan-ilmiah, perekayasaan industri, dan hal-hal lain bukan merupakan penentu utama karena itu semua dapat diraih melalui pemikiran dan hanya dapat dilestarikan melalui pemikiran pula.

Diskripsi di atas sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Taqyuddin An-Nabhani (1999:1), oleh karena itu, apabila kekayaan sebuah bangsa yang bersifat materi hancur, maka dengan segera akan bisa dipulihkan kembali, selama bangsa itu melestarikan kekayaan berpikir mereka. Namun apabila kekayaan berpikir mereka telah terabaikan, dan sebaliknya mereka malah melestarikan kekayaan materi, maka kekayaan itu pun akan segera sirna dan mereka akan kembali menjadi miskin. Apa yang dimaksud dengan pemikiran di sini adalah adanya aktifitas berpikir inovatif pada diri umat terhadap realitas kehidupan yang sedang dihadapi. Dengan kata lain senantiasa merekonstruksi pemikiran sedemikian rupa agar dapat menatap kehidupan yang berkelanjutan sehingga melahirkan metode berpikir yang inovatif.

Kondisi umat Islam dewasa ini dapat dinyatakan sebagai umat yang telah kehilangan pemikiran yang berarti pula kehilangan metode berpikir inovatif. Berbagai fenomena dan fakta dalam realitas kehidupan membuktikan kondisi di mana umat Islam berada pada posisi inferioritas dalam percaturan di berbagai bidang) politik, ekonomi, budaya).

Menurut Taqyuddin An Nabhani (*Ibid*). Generasi umat Islam dewasa ini tidak memiliki pemikiran-pemikiran yang berlawanan dengan pemikiran yang ingin diwujudkan pada dirinya, sehingga generasi itu mampu menyadari hakikat pemikiran yang akan disampaikan kepadanya. Dengan begitu, akan terjadi pertarungan antara dua pemikiran, sehingga mampu menemukan pemikiran yang benar. Kenyataannya tidaklah demikian, justru generasi ini telah kehilangan semua pemikiran beserta seluruh metode berpikirnya yang inovatif.

Ironisnya pada saat yang sama umat Islam sedang terpesona dengan sistem kapitalis, bukan karena memahami secara benar realitas pemikiran kapitalis

melainkan sorotan terhadap keberhasilannya. Kondisi ini semakin memperkuat posisi umat Islam sebagai inferior terhadap kemampuan sistem Islam sebagai solusi bagi problem kehidupan (perekonomian) yang sedang dihadapi.

Kondisi ini tidak terlepas dari faktor eksternal dan internal umat Islam sebagai penyebabnya. Warisan pemikiran kapitalis di mana materi sebagai ukuran keberhasilan ekonomi telah tertancap kokoh berabad lamanya. Selain konsep sistem kapitalis yang memberi ruang gerak individu dalam penguasaan modal dan pencapaian profit, merupakan dua alasan di antara penyebab eksternal, sulitnya sosialisasi dan penerapan sistem ekonomi perspektif Islam. Selain itu, inferioritas dalam peran perekonomian atau penerapan ekonomi perspektif syari'ah sangat ditentukan oleh *action will* penentu kebijakan ekonomi itu sendiri.

Penyebab internal dapat ditelusuri melalui kondisi umat Islam sbb: *Pertama*: Kehilangan rasa kebesaran risalah. Hilangnya pengakuan dalam wujud amaliah umat bahwa *Al Islam ya'lu wala' ya'la 'alaih*. Sebuah ajaran yang bernilai moral tinggi masih sulit mendapat tempat dalam wujud amaliah umat kecuali sesuatu yang transparan memberi hasil secara materi. Pada akhirnya konsep pemikiran *ghairul muslim* yang menjadi sumber rujukan walaupun harus bertentangan dengan konsepsi Islam.

Kedua: Kehilangan kebanggaan sebagai umat Muhammad. Rasa kebanggaan sebagai umat Islam semakin menipis seiring dengan sorotan negatif pihak lain terhadap umat Islam.

Di lain pihak predikat sebagai "*khairah ummah*" sepertinya sulit terwujud, walaupun hal ini harusnya dipahami secara komprehensif dan memerlukan ikhtiar.

Kegagalan Sistem Perekonomian Amoral

Berdasarkan tinjauan historis terdapat 3 sistem ekonomi yang berlaku, kapitalisme, sosialisme dan sistem negara sejahtera yang sekuler. Masing-masing telah mengalami revisi penting dari pemi-

kiran aslinya berhubung problem yang dihadapi selama bertahun-tahun. Walaupun telah melakukan berbagai revisi, sistem ini belum mampu mencapai tujuan. Kemewahan yang dicapai negara penganut sistem yang ada dengan dukungan sumber daya teknologi justru melahirkan problem baru dalam perekonomian. Ketidakseimbangan makro ekonomi, ketidakmerataan distribusi pendapatan, dan tekanan inflasi merupakan sebagian problem ekonomi masa kini.

Problem ekonomi yang dihadapi oleh negara yang menerapkan sistem konvensional pada dasarnya karena sistem itu tidak dibangun di atas landasan moral yang kokoh. Sebagaimana dinyatakan oleh M. Umer Chapra (1999:8). Cacat-cacat ini timbul dari konflik dalam tujuan-tujuannya, yang berakar pada moral dan agama pada masa lalunya, dan pada pandangan dunia serta strateginya, sebagai suatu hasil dari sekularisme dan cerminan sebuah pertentangan dengan tradisi-tradisi agamanya. Karenanya, sistem-sistem yang ada, yang mereka sendiri merasa perlu, meminjam kata-kata Burt, "memikirkan kembali sebuah filsafat yang benar tentang manusia", tidak dapat memberikan suatu model yang dapat ditiru oleh negara-negara Muslim untuk mewujudkan tujuan-tujuannya dengan sumber daya yang relatif lebih kecil dan akan memerlukan beberapa dekade untuk dapat mendekati pencapaian negara-negara yang menganut sistem-sistem ini.

Apa yang dapat dipahami sebagai penyebab kegagalan kapitalis adalah permasalahan yang menyangkut kebutuhan (*needs*) beserta alat-alat pemuas kebutuhan (*goods*). Sistem ini hanya membahas masalah-masalah yang menyangkut aspek materi dan mengabaikan aspek moral dalam perekonomian.

Demikian pula problem ekonomi aktual yang dihadapi oleh negara penganut ekonomi konvensional ini berkaitan dengan sifat pasar dan intervensi pemerintah. Mazhab Adam Smith menyatakan bahwa: kemakmuran (ekonomi) harus

diserahkan kepada mekanisme pasar yaitu mekanisme otomatis pada tingkat *supply-demand*. Intervensi pemerintah hanya sebagai pelengkap mekanisme pasar dan sebaiknya ditiadakan karena merupakan penghambat mekanisme pasar. *The Great Depression* 1930-an menunjukkan kegagalan mekanisme pasar yang dilandasi *natural law* namun kurang memperhatikan peran masyarakat pada umumnya dan *public sector* pada khususnya. Oleh karena itu peran pemerintah diperlukan sebagai agen dalam *public sector services*.

Sebaliknya Mazhab **Richardo** menyatakan bahwa perekonomian harus sepenuhnya diatur oleh pemerintah, mengingat pemerintah memiliki hak regulasi terhadap faktor produksi, dan power dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara berbagai kelompok maupun individu dalam masyarakat. Kegagalan perekonomian negara sosialis dan komunis antara lain disebabkan karena mengabaikan faktor fasilitas dan motivasi para pelaku bisnis.

Sedangkan Mazhab **Keynesian** menyatakan bahwa dalam perekonomian pemerintah berperan sebagai pemicu (*trigen*) perekonomian melalui belanja atau pengeluaran pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Faktor pengeluaran pemerintah (faktor G) akan mendorong permintaan (faktor D) dan bersifat kondusif terhadap faktor konsumsi dan investasi (faktor C dan I). Nampaknya mazhab ini belum representatif dalam meningkatkan perekonomian karena mengabaikan faktor penawaran (faktor S).

Dalam realitas perekonomian pada dasarnya mazhab ekonomi yang berlaku membutuhkan intervensi pemerintah dalam kadar yang berbeda. Menurut Kahn (1989: 132), intervensi dan regulasi pemerintah dalam perekonomian diperlukan apabila terdapat alasan sebagai berikut :

Pertama: Regulasi pemerintah diperlukan untuk melindungi industri *natural monopoly* yang hanya bisa beroperasi dalam keadaan tidak rugi apabila ditentukan Supplier Tunggal dalam perekonomian. Dalam konteks ini regulasi pemerintah bertujuan

harus mengusahakan harga jual output yang lebih guna melindungi kepentingan umum.

Kedua: Apabila intervensi dan regulasi pemerintah berhubungan dengan industri strategis. Industri dimaksud tidak hanya memiliki skala ekonomi yang luas, melainkan juga memiliki keterkaitan strategis dengan industri hilir yang lain. Dapat dikatakan industri tersebut merupakan infrastruktur bagi pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

Ketiga: Pemerintah melakukan intervensi perekonomian apabila mekanisme pasar mengalami kegagalan (*market failure*). Ini berarti terjadi ketidak-efisienan alokasi sumber daya ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Kegagalan mekanisme pasar antara lain ditandai dengan produk merupakan barang publik, produk merupakan barang bereksternalitas dan pasar tidak dalam persaingan sempurna.

Ketiga alasan perlunya intervensi pemerintah dalam perekonomian tersebut cukup menjadi dasar untuk menjustifikasi bagi keberadaan dan peran pemerintah dalam menghadapi perekonomian global.

Paradigma Perekonomian Global

Walaupun tema perekonomian global telah menjadi sasaran bahasan dalam dasawarsa terakhir, namun diskursus yang berkembang belum menyentuh aspek substansial khususnya implikasi yang ditimbulkan. Pembicaraan pragmatis ekonomi pasar bebas lebih terfokus pada persoalan bagaimana meraih keuntungan dalam percaturan pasar global. Keuntungan dimaksud tidak bergeser dari tiga kondisi, yakni meletakkan ekspansi industri manufaktur pada basis yang lebih rasional, mendistribusikan *gains of trade* ke dalam komunitas yang lebih luas, dan menciptakan produk yang marketable agar menghasilkan efisiensi dan pada gilirannya memberi keuntungan riil bagi produsen. Berdasarkan uraian di atas dapat digarisbawahi, bahwa paradigma yang berkembang lebih mencerminkan dampak internal perekonomian suatu

Globalisasi ekonomi, paling tidak memiliki tiga dimensi. *Pertama*, menyebabkan pergerakan dan mobilitas modal semakin tidak memiliki "bendera", dan lebih berdasarkan perhitungan rasional ekonomis. *Kedua*, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyuburnya perusahaan transisional ke seluruh penjuru dunia. *Ketiga*, globalisasi menyebabkan terjadinya pergeseran ekonomi global, yang memunculkan tiga 'megamarkets' ekonomi dunia, yaitu Uni Eropa, Amerika Utara, Asia Timur dan Tenggara (Jepang sebagai motor utama)

negara. Sering diungkapkan bahwa melalui perekonomian global akan mendorong GDP suatu negara dan meningkatkan arus perdagangan internasional yang pada akhirnya akan memberi kontribusi keuntungan bagi konsumen dalam bentuk barang dan jasa yang *high quality* dan *rationable price*.

Sementara itu, bangsa kita pada tahun 2020 akan menghadapi era pasar bebas pada tingkat internasional yang sering diistilahkan sebagai globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi, menurut Anggito Abimanyu (1995), paling tidak memiliki tiga dimensi. *Pertama*, menyebabkan pergerakan dan mobilitas modal semakin tidak memiliki "bendera", dan lebih berdasarkan perhitungan rasional ekonomis. *Kedua*, globalisasi investasi mendorong tumbuh dan menyuburnya perusahaan transisional keseluruhan penjuru dunia. *Ketiga*, globalisasi menyebabkan terjadinya pergeseran ekonomi global, yang memunculkan tiga 'megamarkets' ekonomi dunia, yaitu (1) Uni Eropa, (2) Amerika Utara, (3) Asia Timur dan Tenggara (dengan Jepang sebagai motor utama).

Dimensi yang pertama dan kedua dalam prosesnya didasari pada persoalan tawar-menawar pasar. Suatu kompetisi bebas antara pihak pemilik modal dan pengguna modal. Hal ini, bila kita gali

pada kultur kita sendiri terdapat pada masyarakat pesisir yang hidupnya disangga oleh perdagangan. Fenomena budaya dagang seperti itu pernah hidup pada bangsa ini, yaitu pada abad pertama ketika bangsa ini berhubungan dengan India, pada abad ke-3 ketika berhubungan dengan bangsa Cina, dan abad ke-13 ketika berhubungan dengan saudagar dari Timur Tengah. Sayangnya, pola demikian pada waktu itu kemudian tidak hidup di alam Indonesia.

Dimensi ketiga, pada awal mulanya didasari oleh etos kerja yang andal dan mental serta jiwa *entrepreneur* yang tangguh. Masyarakat negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa sejak abad pencerahan memang telah dikenal sebagai penjelajah yang ingin menaklukkan dunia. Sikap mental yang demikian mengantarkan mereka pada kondisi seperti yang terjadi sekarang ini, khususnya dalam dunia ekonomi. Lebih-lebih masyarakat Amerika Utara.

Paradigma lain perekonomian global menurut pemikiran penulis berkaitan dengan peralihan model perekonomian dari *industrial economy* menuju *information economy*. Dalam bukunya yang populer, *World Class Thriving Locally in Global Economy*, Rosabeth Moss Kanter (1995:21) menguraikan beberapa perkembangan dalam peta perekonomian global. Secara umum, masyarakat sedang mengalami masa transisi dari perekonomian industrial (*industrial economy*) menuju perekonomian informasi (*information economy*). Jika dalam perekonomian industrial, kontradiksi terjadi antara modal dan pekerja, maka dalam perkembangan perekonomian informasi kontradiksi akan terjadi antara *local* dan *cosmopolitans*. Dalam konteks ini, sumber daya informasi akan menjadi kunci utama dalam konfigurasi persaingan global. Keunggulan pihak *cosmopolitans* adalah pada penguasaan informasi sebagai sumber daya dalam persaingan bisnis, yang jangkauannya meliputi seluruh kawasan global.

Namun demikian, penguasaan terhadap informasi bukan sesuatu yang dengan begitu saja bisa dicapai. Guna mendukung keberadaannya, daerah kosmopolit harus memiliki keunggulan dalam bidang

concept, competence dan connections. Ketiga bidang ini merupakan kekayaan yang tidak kelihatan sebagai sumber kekuatan bersaing di era globalisasi ini. Basis persaingan bukan lagi kenyataan material (modal, tenaga kerja, SDA) tetapi pada informasi dan pengetahuan. Berdasarkan paradigma yang berkembang, maka menghadapi globalisasi ekonomi, perekonomian suatu negara hendaknya dibangun di atas fundamental ekonomi yang menyangkut 2 (dua) hal: **Pertama**, pemahaman mengenai konsep yang paling unggul dan terbaru, yang disertai dengan kemampuan untuk menghasilkan kualifikasi produk dengan standar yang tinggi adalah kriteria yang harus dipenuhi. **Kedua**, sementara dalam bidang koneksi, penerapan strategi relasional yang akan menghubungkan suatu wilayah dengan seluruh masyarakat dan organisasi di seluruh kawasan dunia harus selalu diupayakan dengan sungguh-sungguh.

Sebuah bangsa yang ingin masuk dalam percaturan global, selalu dituntut untuk mengembangkan konsep-konsep baru, dengan mengembangkan inovasi yang kreatif. Selain juga harus meningkatkan kompetensi melalui peningkatan inventasi dalam bidang pendidikan, di samping memperkuat koneksi dengan investasi di dalam hal kolaborasi.

Selain penguasaan dari kedua hal tersebut, hal yang juga sangat menentukan adalah kondisi masyarakat, yang dalam hal ini berperan sebagai magnet dan perekat. Mereka harus memiliki daya tarik terhadap sumber daya dari luar; seiring dengan usaha untuk selalu meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan mendorong terciptanya standarisasi di tingkat global.

Fundamental Ekonomi dalam Persaingan Global

Perekonomian Islam dirumuskan dalam suatu sistem yang berbeda dengan sistem yang sedang berlaku. Menurut Umar Chapra (*Ibid*), ia memiliki akar dalam syari'ah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dari sistem-sistem sekular yang menguasai dunia dewasa ini, tujuan-tujuan Islam (*maqashid asy-syari'ah*) adalah bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh ummat manusia.

Hal ini dikarenakan keimanan yang mendasari bahwa kedudukan/peran manusia sebagai khalifah dan hamba Allah di muka bumi, yang tidak dapat mencapai kabahagiaan dan kedamaian batin kecuali setelah tercapainya kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan rohani dan materi secara seimbang.

Selanjutnya *Maqashid Asy-Syari'ah* merupakan segala sesuatu yang diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayyatan tayyibah*). Imam Al Ghazali berpendapat bahwa *Maqashid Asy-Syari'ah* perlu untuk melindungi dan memperkaya iman, interaksi manusia, keturunan dan harta benda. Dalam sistem perekonomian, ia juga merupakan filter moral dalam produksi,

Perekonomian Islam memiliki akar dalam syari'ah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dari sistem-sistem sekular yang menguasai dunia dewasa ini, tujuan-tujuan Islam (*maqashid asy-syari'ah*) adalah bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayat thayyibah*), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi maupun rohani dari seluruh umat manusia.

konsumsi dan pengalokasian sumber daya sesuai aturan persaudaraan atau keadilan sosio-ekonomi. Menurut M. Anas Zarqa dalam *Capital Allocation*, bahwa efisiensi dan keadilan ekonomi sulit didefinisikan apalagi dilaksanakan tanpa rujukan filter moral.

Namun demikian sebagai suatu sistem yang komprehensif perekonomian syari'ah tidak sekedar menawarkan alternatif yang bercirikan legitimasi moral, melainkan sebuah tawaran konsep khas yang berbasis syari'ah Islam. Konsep sistem zakat dan pewarisan, pemilikan dan kontrol perusahaan, skala prioritas pengeluaran, pajak yang adil dan efisien, rancangan konsep produksi, merupakan sebagian konsepsi yang ditawarkan perekonomian Islam sebagai suatu sistem.

Menghadapi persaingan perekonomian global dengan keunggulan konsep inovatif yang berbasis pada 2 (dua) kriteria yaitu kualifikasi produk dan membangun koneksitas melalui strategi relasional merupakan diantara konsepsi strategi yang ditawarkan sistem perekonomian perspektif syari'ah.

Pertama: Kualifikasi Produk

Persaingan dalam perekonomian dan bisnis global kelak bukan semata-mata berorientasi pada perolehan laba melainkan ditekankan pada kelangsungan hidup suatu usaha. Kelangsungan hidup dimaksud diwujudkan dalam bentuk tercapainya kepuasan pelanggan berkelanjutan. Kepuasan pelanggan akan tercapai manakala perusahaan mampu menterjemahkan selera konsumen atas suatu produk, kemampuan/daya beli konsumen, maupun memberikan pelayanan terbaik. Tuntutan diatas sebagai persyaratan dan basis dalam menghadapi kompetisi perekonomian global sekaligus mengubah paradigma sistem perekonomian konvensional yang berorientasi profit. Dalam perekonomian konvensional mekanisme perekonomian dirancang dalam suatu alur proses: produksi, distribusi, dan konsumsi, sedangkan dalam perspektif syari'ah distribusilah yang ditempatkan pertama kemudian produksi barulah konsumsi menjadi persoalan berikut. Sebagaimana dinyatakan

oleh M.A. Manan (1992: 44), dalam perekonomian Islam distirbusilah yang menggiatkan produksi dan konsumsi. Dengan perkataan lain, pertanyaan pertama yang harus diputuskan dalam mekanisme perekonomian syari'ah adalah: (a) Barang dan jasa apa yang akan dihasilkan, (b) Bagaimana cara menghasilkan menjadi urutan prioritas berikutnya.

Paradigma sistem perekonomian syari'ah dengan memprioritaskan aspek distribusi berkaitan dengan misi dan tujuan yang ingin dicapai dalam perekonomian syari'ah, yaitu kesejahteraan sosial dalam arti luas. Sedangkan perekonomian konvensional lebih mengedepankan aspek produksi berkaitan dengan tujuan meraih profit sebesar-besarnya. Maka pertanyaan pertama yang harus dijawab dalam paradigma sistem perekonomian konvensional adalah "Berapa banyak kuantitas produksi yang harus dicapai guna meraih profit, barulah mempertimbangkan aspek produksi dan konsumsi.

Pergeseran paradigma mekanisme perekonomian sebagai tuntutan persaingan perekonomian global sejalan dengan perspektif perekonomian syari'ah yang pada dasarnya berkaitan dengan persoalan bagaimana memahami kondisi daya beli konsumen dan selera konsumen. Sehubungan dengan itu perekonomian syari'ah menekankan 4 (empat) aspek (QCD dan S) sebagai suatu keharusan dalam menghadapi tantangan perekonomian dan bisnis global.

-Quality of Product (Q). Ketatnya persaingan bisnis, menjadikan mutu (Q) bukan lagi suatu keinginan semata, tapi merupakan keharusan. Konsepsi mutu banyak ragamnya. Mutu didefinisikan sebagai totalitas gambaran dan karakteristik dari barang dan jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memberikan kepuasan dan kebutuhan, baik yang tersurat maupun tersirat. Secara sederhana, mutu itu didefinisikan sebagai sesuatu yang memenuhi persyaratan/kebutuhan. Ini, akan memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam mengukur mutu dan mengetahui kapan persyaratan itu dipenuhi atau tidak. Kesamaan pandang

dan bahasa dalam mengartikan mutu, sangat diperlukan untuk mengukur dan mengendalikan mutu secara mudah.

Adanya pesan moral dalam perekonomian syari'ah bahwa barang yang diproduksi dan dikonsumsi merupakan barang dan jasa yang *halalan thayyibah* (QS. al-Baqarah: 168) tidak lain berkaitan dengan kualitas produk itu sendiri.

-Aspek Kompetitif Cost (C). Konsep barang atau jasa yang berkualitas tinggi harus mahal, tak dapat digunakan lagi. Banyak perusahaan beranggapan, untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki mutu yang tinggi diperlukan biaya (C) yang tidak sedikit, sehingga harga jualnya menjadi tinggi. Kita perlu belajar pada Jepang, saat mulai membangun industrinya. Beberapa orang masih beranggapan, Jepang bisa maju karena keberhasilan praktik *dumping* dalam perdagangan, mungkin ada benarnya. Akan tetapi, keberhasilan Jepang, karena banyak belajar dari kegagalan Barat. Mereka berhasil menerapkan konsep menghasilkan suatu produk "lebih baik dan lebih murah, serta melakukannya dengan benar sejak saat pertama" (perencanaan produksi).

Pentingnya efisiensi biaya bagi kalangan bisnis dalam menghadapi kompetisi global berpijak pada ajakan mengkonsumsi sesuatu secukupnya dan janganlah berlebihan sebagaimana pesan al-Qur'an.

-Aspek Delivery Time (D), berkaitan dengan waktu pengiriman produk. Waktu pengiriman (D), seringkali dianggap kurang penting. Banyak produsen menganggap waktu pengiriman tidak mempengaruhi keandalan perusahaan dan kualitas produk, dimata pelanggan. Waktu pengiriman, justru merupakan kunci penting dalam era perdagangan bebas, karena sangat menentukan ketersediaan barang dan jasa, saat pelanggan memerlukannya. Bila produsen mengabaikan faktor ini, tak langsung pelanggan akan beralih pada produk lain yang sama, tapi siap saat diperlukan. Jadi faktor waktu pengiriman menjadi tuntutan pelanggan, selain mutu dan biaya.

Pentingnya aspek *Delivery Time* (D) terancang nilai kedisiplin waktu menurut konsepsi syari'ah Islam, bahkan dikategorikan sebagai manusia yang merugi (QS.al-Asr: 1-3).

-Aspek Safety (S) berkaitan dengan pengamanan produk baik saat pengiriman maupun penggunaan produk oleh pelanggan. Faktor keselamatan pelanggan (S), juga perlu diutamakan. Saat membeli suatu produk, pada setiap kemasan selalu tercantum produk tersebut layak dikonsimasi, diperiksa oleh lembaga berwenang, juga masa kadaluarsanya. Ini menunjukkan, faktor keselamatan pengguna produk tersebut diutamakan oleh produsen maupun lembaga resmi yang berwenang memeriksa kelayakan suatu produk.

Kedua; Membangun Strategi Relasional; Saling Ketergantungan perekonomian antar negara pada era globalisasi seringkali melahirkan konotasi atau pilihan tunggal; antara menentukan atau ditentukan oleh negara/ kawasan lain.

Terminologi lain lebih terkesan optimistis menyatakan bahwa globalisasi ekonomi tidak akan menghasilkan pecundang maupun pemenang absolut karena yuridiksi global di bawah *World Trade Centre* (WTC) bakal mengeliminasi dua kecenderungan ekstrim tersebut. Di balik pesan-pesan itu mencul paradoks baru yang penuh muatan kepentingan negara industri maju. Para pioner dan pendukung utama globalisasi perekonomian seperti kelompok G 7 dan Uni Eropa dengan gigih mendesak sejumlah isu aktual yang tertuang dalam kesepakatan Marrakesh 15 April 1994 sebagai hasil final putaran Uruguay.

Fenomena lain menghadapi perekonomian global berdasarkan tinjauan ekonomi kawasan bahwa telah terjadi perubahan peta kekuatan dari kawasan Tripolar (AS, Jepang, industri maju/ Eropa Barat) menjadi kawasan Multipolar. Amerika Utara dengan NAFTA, Uni Eropa dengan MEE (EEC), Asia Pasifik dengan APEC, ASEAN dengan AFTA, dan kerjasama negara Asia Selatan (SAARC) menelurkan kawasan perdagangan bebas Asia Selatan /SAFTA (*South Asia Free Trade Area*).

Memahami kondisi perubahan peta kawasan perekonomian global penting artinya dalam membangun relasi dalam sistem perekonomian terbuka. Sementara membangun relasi di atas prinsip saling menguntungkan merupakan strategi fundamental dalam menghadapi perekonomian global. Dalam konteks ini syari'ah Islam tidak memberi batasan yuridikasi yang terlalu ketat sebagai contoh bermuamalah Rasulullah sampai dengan zaman Khulafa'ur Rasyidin. Hukum perdagangan luar negeri Syari'ah Islam tidak berhubungan dengan komoditi dan dari negara mana komoditi itu berasal. Namun hukum komoditi mengikuti hukum yang mengatur aktivitas perdagangan pemilik komoditi (pelaku bisnis). Sebagaimana dinyatakan oleh Taqyuddin An Nabhani (1999: 324). Hal ini berbeda dengan sistem Kapitalis, sebab hukum perdagangan luar negeri, menurut Kapitalis, hanya mengikuti komoditinya semata bukan pemiliknya. Sehingga komoditi tersebut akan diteliti dari mana sumbernya, bukan dari segi pelaku bisnisnya –atau siapa yang membawanya. Inilah bedanya, antara pandangan Islam dan kapitalis. Karena, sistem kapitalis melihat komoditi dan sumber yang menghasilkan komoditi tersebut, maka kapitalis memberikan hukum sesuai dengan hukum dari mana sumbernya. Sementara Islam, melihat berdasarkan pemilik komoditinya, yaitu berdasarkan pelaku bisnisnya, tanpa memperhatikan dari mana sumber yang menghasilkannya. Jadi, kapitalis menilai berdasarkan komoditinya. Sedangkan Islam menilai berdasarkan pelakunya.

Benar, bahwa jenis komoditi yang diperdagangkan memang mempunyai pengaruh dalam membolehkan dan melarang perdagangan. Akan tetapi, hal ini berhubungan dengan sifat komoditi, dilihat dari segi apakah komoditi tersebut berbahaya atau bermanfaat, dimana masalah tersebut tidak terlihat dari mana sumbernya. Sementara hukum syara' hanya menilai berdasarkan pelaku yang memiliki perdagangan, yaitu pelaku bisnisnya, bukan berdasarkan komoditinya.

Perspektif perdagangan internasional di atas memberi ruang gerak yang cukup dalam membangun relasi sebagai fundamental menghadapi perekonomian global. Pada akhirnya konsep perekonomian perspektif syari'ah akan memberi kontribusi dalam menghadapi tantangan persaingan perekonomian global berpulang kepada *action will* pengambil keputusan perekonomian di suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, (2001), *Etika Bisnis Modern dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Al – Mubarakfury, (et. al), (1998), *Sirah Nabawiyah*, PT.Rabbani Press, Jakarta.
- An Nabhani, Taqyuddin, (1999), *An Nidhan Al Iqtishadi Fil Islam*, Darul Ummah, Beirut.
- Chapra, M.Umar, (1999), *Islam and the Economic Challenge*, The International of Islamic Thought, USA.
- Kamal, Mustafa, (1997), *Wawasan Islam dan Ekonomi, Sebuah Bunga Rampai*, Penerbit LP-FEUI, Jakarta.
- Khaf, Monzer, (1995), *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Sistem Ekonomi Islam)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Mannan, M.A, (1992), *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, PT. Intermassa, Jakarta.
- Porter, Michael.E, (1993), *Competitive Advantage*, Collier Macmillan Publishers.
- Qardhawi, Yusuf, (1997), *Daurul Qiyam wal Akhlaq Fil Ikhtishadil Islam* (Terj) Rabhani Press, Jakarta.
- _____, (1997), *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Salvatore, Dominick, (1984), *Theory and Problems of International Trade*, Mc Graw Hill, Inc.
- Todaro, Michael.P, (1978), *Economic Development in the Third World*, Longmen Inc, New York-USA.
- Wilson, Rodney, (1998), *Bisnis Menurut Islam Teori dan Praktek* (Terj), PT Intermedia, Jakarta.
- Zamahsari, Moezamil, (1992), *Pemasaran Internasional*, Intermedia, Jakarta.